

CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE DI INDONESIA (LITERATURE REVIEW)

^aKartika Pradana Suryatimur, ^bSuci Nasehati Sunaningsih

^{ab} Universitas Tidar

^akpsuryatimur@untidar.ac.id

Received: 2022 May 30

Accepted: 2022 June 15

Published: 2022 June 25

ABSTRAK

Corporate Governance dan Tax Avoidance Di Indonesia (Literature Review). Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian manajemen perusahaan, menjadi alat untuk menekan tindakan tax avoidance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak corporate governance dan tax avoidance melalui recent article. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review, dengan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya tentang hubungan antara corporate governance dan tindakan tax avoidance. Pada penelitian ini menelaah tiga dari sembilan aspek corporate governance yaitu: komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit. Hasil penelitian mengindikasikan mekanisme corporate governance di Indonesia belum efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan pengendalian. Hasil dari beberapa penelitian masih belum konsisten dan memberikan hasil yang akurat, sehingga diperlukan penelitian dengan berbagai pendekatan lain untuk menemukan solusi pada masalah ini

Kata kunci: Tax avoidance, Corporate Governance

ABSTRACT

Corporate Governance and Tax Avoidance in Indonesia (Literature Review) Corporate governance is a mechanism for monitoring and controlling company management, becoming a tool to reduce tax avoidance in Indonesia. This study aims to determine the impact of corporate governance and tax avoidance through recent articles. The research method used is a literature review, by examining previous studies on the relationship between corporate governance and tax avoidance measures. This study examines three of the nine aspects of corporate governance, namely: the audit committee, independent commissioners, and audit quality. The results of the study indicate that the corporate governance mechanism in Indonesia has not been effective in carrying out its role as monitoring and controlling. The results of several studies are still inconsistent and provide accurate results, so research with various other approaches is needed to find a solution to this problem.

Keywords: Tax avoidance, Corporate Governance

PENDAHULUAN

Tax avoidance merupakan sebuah isu dalam dunia bisnis yang hampir tidak pernah hilang. Kasus terkait strategi pajak yang agresif ini diduga juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar global seperti Google, Facebook, dan juga Apple (Davis, Guenther, Krull, & Williams, 2016). Kasus besar yang pernah menggegerkan dunia bisnis global diantaranya adalah kasus yang melibatkan perusahaan level dunia yaitu Enron dan Tyco, menunjukkan betapa tindakan manajemen yang menerapkan strategi agresif

terhadap pajak. Namun demikian tidak sedikit juga perusahaan yang mengeluarkan uang untuk membayar pajak dengan jumlah yang sangat besar (Thomsen & Wartin, 2018). Muncul sebuah pertanyaan terkait tax avoidance, mengapa manajemen perusahaan melakukan tindakan yang agresif terhadap perpajakan, sementara ada beberapa tawaran yang dapat dilakukan untuk dapat menekan pembayaran pajak secara legal (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2008).

Sejak tax avoidance terbukti dapat mempengaruhi kinerja arus kas masuk menjadi lebih baik (Austin & Wilson, 2017), ekspektasi pemegang saham terhadap manajemen perusahaan menjadi lebih tinggi. Manajemen perusahaan melihat tax avoidance sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investor. Dengan demikian apakah mekanisme corporate governance masih relevan untuk dijalankan pada kondisi dimana kepentingan pemegang saham yang mementingkan expected return tinggi.

Hubungan antara corporate governance dan tax avoidance saat ini menjadi topik penelitian yang semakin berkembang. Dalam lima tahun terakhir banyak penelitian yang menguji hubungan antara corporate governance dan tax avoidance. Beberapa aspek corporate governance yang banyak diuji hubungannya dengan tax avoidance antara lain, komite audit (Damayanti & Susanto, 2015, /Tehupuring, 2016, Singly & Sukartha, 2015, Kartana, Agung, & Wulandari, 2018), komisaris independen (Maraya & Yendrawati, 2016, Astuti, Dewi, & Fajri, 2020, Kartana, Agung, & Wulandari, 2018), dan kualitas audit (Mais & Patminingih, 2017, Damayanti & Susanto, 2015, /Maraya & Yendrawati, 2016). Sementara variabel lain yang biasa diuji dengan penelitian corporate governance dan tax avoidance antara lain; profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan lain sebagainya.

Keberadaan corporate governance dalam perusahaan akan mampu menekan permasalahan agensi terkait praktik tax avoidance yang dilakukan manajemen (Desai & Dharmapala, 2009). Lebih lanjut Desai dan Dharmapala (2009) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki mekanisme pengendalian internal yang lebih baik untuk mencegah tindakan tax avoidance, dan berpendapat bahwa insentif manajemen memiliki hubungan negatif dengan tindakan tax avoidance. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk akan melakukan tindakan tax avoidance karena tidak memiliki mekanisme pengendalian internal yang baik. Menurut (Sartori, 2008) terkait dengan strategi perpajakan dan corporate governance, perusahaan yang memiliki struktur corporate governance yang baik akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. corporate governance merupakan sistem dan struktur yang dapat menjadi kontrol pemegang saham terkait perbedaan kepentingan dengan manajemen (Damayanti & Susanto, 2015).

Sebagaimana uraian di atas yang menjelaskan bahwa corporate governance dapat memberikan pengaruh kepada manajemen dalam mengambil keputusan termasuk kebijakan pajak. Prinsip corporate governance yang meliputi fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency menurut penelitian Damayanti & Susanto (2015), Tehupuring (2016), dan Maraya & Yendrawati (2016) dapat tercermin dalam berbagai variabel antara lain kualitas audit dan ukuran komite audit.

KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi menyatakan sebuah hubungan kontrak antara agen dan prinsipal, dimana pihak agen memiliki kewajiban menjalankan tugas untuk pihak prinsipal, dan pihak prinsipal memberikan imbalan atas tugas yang dilakukan oleh pihak agen (Hendriksen & Breda, 1992). Pada sebuah perusahaan, laporan keuangan menjadi sarana bagi manajemen (pihak agen) menyampaikan informasi kepada pemegang saham (pihak prinsipal) (Rahmawati, 2006). Dalam mengelola modal dari pemegang saham, manajemen memiliki informasi yang lebih banyak tentang keadaan perusahaan. Hal itu menimbulkan perbedaan kualitas informasi yang dimiliki antara manajemen dan pemegang saham yang disebut asimetri informasi.

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (principal). Hal tersebut disebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek serta potensi perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan para pemegang saham dan stakeholder lain (Kurniasih & Sari, 2013). Berdasarkan teori agensi, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian adalah penyebab utama yang memicu munculnya tindakan tax avoidance oleh manajemen perusahaan (Kovermann & Velte, 2019). Timbulnya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat diatasi dengan corporate governance.

Tax Avoidance

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan tax avoidance adalah segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk menekan pajak dengan menurunkan pendapatan sebelum pajak (Kovermann & Velte, 2019). Tax avoidance merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk menekan beban pajak (Dyreg et al., 2008). Pada praktiknya manajemen yang melakukan tax avoidance memanfaatkan grey area yang ada pada peraturan perpajakan. Tindakan tax avoidance hanya menguntungkan pihak manajemen pada jangka pendek, namun sebaliknya akan merugikan bagi pemegang saham pada jangka panjang. Tax avoidance dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan kreditur maupun pemegang saham terkait asimetri informasi dan menimbulkan moral hazard (Lim, 2011). Selain itu, tax avoidance memunculkan resiko pelanggaran pajak dan menyebabkan citra buruk perusahaan (Tehupuring, 2016).

Tax avoidance merupakan strategi agresif perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Manajemen dapat menekan biaya pajak sehingga laba perusahaan meningkat namun praktik tax avoidance memiliki resiko buruk bagi perusahaan (N. A. Annisa & Kurniasih, 2012). Keputusan manajemen melakukan tindakan tax avoidance dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek (Budiadnyani, 2020). Apabila tindakan tax avoidance terdeteksi oleh pihak yang berwenang maka dapat menimbulkan utang pajak, denda pajak, dan mendapatkan reputasi buruk di mata masyarakat dan investor (Hanlon & Slemrod, 2009). Lebih lanjut (Hanlon & Slemrod, 2009) menyatakan bahwa prinsipal dapat memilih tingkat tax avoidance, dengan kebijakan pajak yang agresif maka dapat meningkatkan return namun juga berbanding lurus dengan risiko yang harus ditanggung, atau memilih kebijakan pajak yang tidak agresif dengan risiko yang lebih rendah.

Corporate Governance

Corporate governance menunjukkan sebuah sistem kepengurusan yang ada dalam perusahaan. Kepengurusan tersebut menjelaskan tata kelola yang baik maupun buruk dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam tata kelola perusahaan. Dari tata kelola tersebut perusahaan berupaya untuk menekan pajaknya karena adanya tekanan dari berbagai pihak (Jati et al, 2019). Corporate governance menjadi sebuah strategi pengelolaan bisnis untuk meminimalisir konflik yang muncul akibat pengambilan keputusan (S. Annisa, Rizal, & Herawaty, 2021). Karakteristik corporate governance yang ada pada perusahaan dapat merefleksikan kebijakan dan strategi manajemen pajak yang diterapkan. Beberapa elemen dari corporate governance yang mampu digunakan untuk mengetahui bagaimana manajemen pajak diterapkan diperusahaan antara lain ialah ukuran komite audit dan kualitas audit (Meilinda & Cahyonowati, 2013).

Tax Avoidance dan Corporate Governance

Hanlon & Slemrod, (2009) menyatakan bahwa Manajer perusahaan memiliki kewenangan untuk memilih tingkat tax avoidance yang dapat dilakukan. Tingkat tax avoidance yang ditetapkan oleh manajer akan dipengaruhi oleh efektifitas mekanisme corporate governance dan insentif manajemen.¹ Dalam hal penentuan kebijakan perpajakan perusahaan, keberadaan corporate governance adalah untuk memastikan bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang inefficiency dengan tidak memaksimalkan

sumber daya dengan tingkat pajak yang tinggi. Ketidakhadiran mekanisme corporate governance dalam perusahaan menyebabkan manajer perusahaan tidak bertindak efektif dalam menekan tingkat pajak. Sehingga mekanisme corporate governance yang buruk akan menyebabkan terjadinya tindakan tax avoidance yang memiliki risiko tinggi.

Sementara itu pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Dharmapala & Desai, (2006), tax avoidance dan insentif manajemen merupakan hal yang saling melengkapi. Ketiadaan insentif manajemen menyebabkan tindakan manajer yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri, sama seperti tindakan earning management. Manajemen perusahaan cenderung menerapkan kebijakan perpajakan agresif apabila tidak ada mekanisme corporate governance yang baik./1

METODE

Artikel ini menggunakan metode *literature review*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan *literature review* secara komprehensif pada hubungan antara *corporate governance* yang meliputi komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan *tax avoidance* di Indonesia. Telaah dilakukan pada artikel ilmiah yang menguji secara empiris hubungan *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, kualitas audit) dan *tax avoidance* di Indonesia. Hasil dari paper ini akan menunjukkan bagaimana peran mekanisme *corporate governance* dalam menekan *tax avoidance* yang ada di Indonesia berdasarkan beberapa paper terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Synthesis audit committee dan tax avoidance

Komite audit merupakan susunan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dalam proses pengauditan atas pelaksanaan fungsi manajer dalam mengelola perusahaan. Tugas dari komite audit diantaranya; menelaah risiko, pengawasan terhadap ketaatan peraturan yang berlaku, dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Dengan demikian semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan.

Penelitian (Tehupuring, 2016) menguji hubungan antara komite audit dan tax avoidance, hasil dari pengujian tersebut menunjukkan tidak terdapat hubungan diantara keduanya. Jumlah komite audit yang ada pada suatu perusahaan tidak dapat menjamin untuk tidak terjadinya tindakan tax avoidance./1Hasil dari penelitian (Tehupuring, 2016) senada dengan penelitian (Damayanti & Susanto, 2015). Meskipun Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar dalam bursa untuk memiliki komite audit dengan jumlah anggota minimal tiga orang, namun hal tersebut dinilai tidak efektif dalam menekan tindakan tax avoidance (Damayanti & Susanto, 2015). Hasil yang sama juga terjadi pada pengujian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha, (2015), komite audit tidak berpengaruh terhadap pengurangan tindakan tax avoidance pada perusahaan. Hasil yang sama juga didapatkan pada pengujian yang dilakukan dalam penelitian (Kartana et al., 2018). Komite audit merupakan bagian dari mekanisme corporate governance yang dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keberadaan corporate governance yang terstruktur tidak menjamin akan dapat mengatasi masalah yang muncul karena keagenan (Kartana et al., 2018). Jumlah anggota komite audit yang sedikit dinilai lebih efisien terhadap pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Namun demikian hal tersebut juga memiliki kelemahan yaitu kurangnya pengalaman dan kompetensi anggota komite audit (Damayanti & Susanto, 2015).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah disampaikan di atas, menunjukkan hasil bahwa keberadaan komite audit belum dapat memberikan dampak signifikan untuk menekan tindakan manajemen dalam melakukan tax avoidance. Jumlah komite audit yang semakin banyak pada perusahaan, tidak menjamin pengawasan yang lebih efektif. Peneliti menduga diperlukan pengalaman, kompetensi, dan keterampilan

yang dimiliki anggota komite audit untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengalaman, kompetensi, dan keterampilan yang dimiliki anggota komite audit terhadap efektifitas pengawasan dalam rangka menekan tindakan tax avoidance.

Synthesis Independent Commissioner dan Tax Avoidance

Keberadaan komisaris independen memiliki tujuan untuk memastikan prinsip dan mekanisme corporate governance berjalan dengan semestinya. Independensi yang diwajibkan dimiliki komisaris independen diharapkan mampu memberikan masukan sekaligus berfungsi sebagai pengendalian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Regulasi BEI mewajibkan perusahaan yang terdaftar setidaknya memiliki jumlah komisaris independen yaitu 30% dari total komisaris yang ada (Maraya & Yendrawati, 2016). Semakin banyak jumlah komisaris independen yang ada dalam jajaran komisi perusahaan akan memberikan fungsi monitoring yang lebih baik terhadap aktivitas manajemen termasuk dalam mengawasi tindakan tax avoidance (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, Larcker, & Armstrong, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Maraya & Yendrawati, (2016) menguji pengaruh komisaris independen terhadap tindakan tax avoidance menunjukkan hasil tidak signifikan, artinya jumlah komisaris independen tidak mampu menekan tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris independen dinilai masih lemah pada fungsi pengawasan dan pengendalian, sehingga tindakan manajemen seperti tax avoidance masih dapat terjadi.

Hasil penelitian Kartana et al.,(2018) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan Maraya & Yendrawati, (2016), yaitu komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme corporate governance yang dilakukan hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku, Hal tersebut yang menyebabkan keberadaan corporate governance tidak memberikan dampak pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen (Kartana et al., 2018).

Hasil pengujian komisaris independen dan tax avoidance yang dilakukan Astuti et al., (2020) menunjukkan hasil yang berbeda dibanding dengan hasil dari penelitian Kartana et al., (2018) dan Maraya & Yendrawati, (2016). Pengujian Astuti et al., (2020) pada komisaris independen dan tax avoidance menunjukkan adanya pengaruh signifikan diantara keduanya. Lebih lanjut Astuti et al., (2020) menyatakan posisi dewan komisaris didalam perusahaan merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan-tindakan manajemen, salah satunya adalah untuk melakukan tax avoidance.

Ketiga hasil penelitian yang menguji pengaruh komisaris independen dan tax avoidance (Maraya & Yendrawati, 2016, Astuti, Dewi, & Fajri, 2020, Kartana, Agung, & Wulandari, 2018) masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan berbagai alternative metode untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat konsisten, sehingga hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Synthesis Audit Quality and Tax Avoidance

Salah satu aspek yang ada pada corporate governance adalah transparansi. Laporan keuangan merupakan bentuk pengungkapan transparansi atas kondisi perusahaan secara financial. Pengungkapan pada laporan keuangan bergantung pada kualitas audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang terjadi selama proses audit dan dilaporkan dalam laporan keuangan audited (Dewi & Jati, 2014). Kualitas audit biasanya diukur berdasarkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan proses audit terhadap laporan keuangan perusahaan. KAP yang dinilai memiliki kredibilitas tinggi termasuk dalam The Big Four (Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y).

Mais & Patminingih, (2017) melakukan penelitian yang menguji hubungan kualitas audit dan tindakan tax avoidance, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas audit dan tax avoidance. Lebih lanjut (Mais & Patminingih, 2017) menyatakan bahwa KAP yang termasuk dalam The Big Four dinilai lebih dipercaya oleh pihak tax authority karena memiliki integritas dan patuh terhadap peraturan, sehingga laporan yang diaudit oleh KAP The Big Four minim tindakan kecurangan.

Hasil penelitian Maraya & Yendrawati, (2016) menunjukkan hasil yang sama dengan pengujian Mais & Patminingih, (2017), yaitu kualitas audit memiliki pengaruh terhadap tindakan tax avoidance. Lebih lanjut Maraya & Yendrawati, (2016) menjelaskan bahwa KAP The Big Four yang terbukti bekerja secara profesional dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai auditor bereputasi. Ketika perusahaan diaudit oleh KAP the big four, manajemen menyadari bahwa tindakan kecurangan kecil akan berpotensi menjadi temuan dalam proses audit, termasuk tindakan tax avoidance. Dengan demikian manajemen lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan perpajakan yang agresif.

Pengujian hubungan kualitas audit dan tax avoidance yang dilakukan oleh Damayanti & Susanto, (2015) menunjukkan tidak ada pengaruh diantara keduanya, hasil ini berbeda jika dibandingkan hasil penelitian Mais & Patminingih, (2017) dan Maraya & Yendrawati, (2016). Kebijakan tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen berkaitan dengan pemanfaatan celah pada peraturan perpajakan, sedangkan proses audit laporan keuangan dilakukan berdasarkan standar audit yang berlaku (Suryatimur, Panjawa, & Khabibah, 2020). Adanya perbedaan standar tersebut memungkinkan tindakan tax avoidance tidak terdeteksi oleh auditor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mais & Patminingih, 2017, Damayanti & Susanto, 2015, Maraya & Yendrawati, 2016, belum konsisten. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut terkait hubungan kualitas audit dan tax avoidance sehingga didapatkan hasil yang dapat menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan.

SIMPULAN

Berdasarkan literature review yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Jumlah komite audit yang lebih banyak belum tentu meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan manajemen dalam melakukan tax avoidance. Perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi anggota komite audit dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian.

Hasil literature review untuk aspek komisaris independen terhadap tax avoidance belum menunjukkan hasil yang konsisten. Masih terdapat perbedaan hasil yang dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk mengetahui hubungan komisaris independen dan tax avoidance. Hasil penelitian yang belum konsisten belum dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian yang menguji hubungan komite audit dengan tindakan tax avoidance juga belum menunjukkan hasil yang konsisten. Jumlah komite audit masih belum terbukti efektif dalam pengawasan dan pengendalian manajemen dalam menekan tindakan tax avoidance. Namun hasil tersebut juga belum konsisten dengan penelitian-penelitian yang menguji komite audit dan tax avoidance. Dengan demikian masih diperlukan penelitian lebih lanjut dengan variabel serupa sehingga didapatkan hasil yang dapat diterapkan pada dunia riil.

REFERENSI

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–132.
- Annisa, S., Rizal, M., & Herawaty, T. (2021). Studi Literatur: Implementasi Good Corporate

- Governance Pada Bisnis Keluarga. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan BIsnis*, 6(2), 72–83.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., Larcker, D. F., & Armstrong, C. S. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 8, 1–42. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210–215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Austin, C. ., & Wilson, R. . (2017). An examination of reputational costs and tax avoidance: Evidence from firms with valuable consumer brands. *The Journal of the American Taxation Association*, 1(39), 67–93.
- Budiadnyani, N. P. (2020). Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 67–90.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015a). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *E S E N S I Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015b). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(11), 187–206.
- Davis, A., Guenther, D., Krull, L., & Williams, B. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes? *The Accounting Review*, (91), 47–68.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). *Corporate tax avoidance and firm value*. 91(August), 537–546.
- Dewi, N. ., & Jati, I. . (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax di Bursa Efek Indonesia. *E- Jurnal Akuntansi*, 6, 249–260.
- Dharmapala, D., & Desai, M. A. (2006). high-powered incentives \$. *Journal of Financial Economics*, 79, 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. 83(1), 61–82.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, (93), 126–141.
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. (1992). *Accounting Theory* (5th ed.). USA: Richard D Irwin Inc.
- Kartana, I. W., Agung, G., & Wulandari, S. (2018). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of corporate governance on corporate tax avoidance - A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, (36).
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1 Februari 2013), 58–66.
- Lim, Y. (2011). Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35, 456–470.
- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE OF THE COMPANY IN LISTED OF THE INDONESIA STOCK EXCHANGE. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(02), 230–243.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Tambang CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2).
- Meilinda, M., & Cahyonowati, N. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1–13.

- Rahmawati. (2006). Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Sartori, N. (2008). Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*, (<https://ssrn.com/abstract=1358930>).
- Suryatimur, K. P., Panjawa, J. L., & Khabibah, N. A. (2020). PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR TAHUN 2016–2018. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(2), 171–181.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47–62.
- Tehupuring, R. (2016). Corporate Governance, Tax Avoidance, Audit Delay Dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Bei Periode 2010-2014). *Jurnal InFestasi*, 12(1), 85–97.
- Thomsen, M., & Wartin, C. (2018). Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms. *Firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, (33), 40–63.